



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1//735D/436.6.4/2011

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010,tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010,tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor. 331/Skr/PKK-KS/IX/2011, tanggal, 8 September 2011 beserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sawahan Nomor - 420/207/436.11.11.2/2011 tanggal, 23 Agustus 2011 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

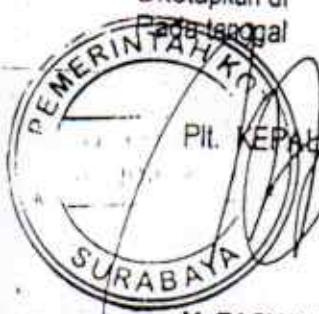
MENETAPKAN

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua	:	Suprihatin
Nama Kelompok.	:	" BHINNEKA "
Jenis Pendidikan	:	PAUD Jalur Non formal (POS PAUD TERPADU)
Tahap.	:	I (satu)
Alamat	:	Jl. Kedung Anyar 3 / 43
Kelurahan	:	RT. 05 RW : XIII
Kecamatan	:	Sawahan
Kota	:	Sawahan Surabaya

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2011 s/d 20 September 2012
- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Surabaya
Pada tanggal : 21 September 2011



M. TASWIN, SE, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620318 199003 1 003

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.